

**ANALISIS PENERAPAN PSAP NOMOR 02  
TENTANG LRA DAN KINERJA KEUANGAN  
(Studi Kasus pada RSJD Dr Amino Gondohutomo Jawa Tengah)**

**Padma Siwi Nawang Enjang, Siti Mutmainah<sup>1</sup>, Lilis Mardiana A.<sup>2</sup>**  
Politeknik Negeri Semarang, Jl. Prof. Soedharto, SH Tembalang Semarang, 50278

**ABSTRAK:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan PSAP No.02 tentang LRA dan untuk menganalisis kinerja pendapatan dan belanja dilihat dari (1) Rasio Pertumbuhan PAD (2) Rasio Kemandirian Keuangan (3) Rasio Efektivitas PAD (4) Rasio Efisiensi PAD pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang di dukung dengan analisis rasio. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyajian-LRA sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No.2 , dan kinerja keuangan RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2023 dilihat dari (1) Rasio pertumbuhan belum mampu meningkatkan pertumbuhannya dengan angka rata-rata 15%. (2) Rasio Kemandirian sudah masuk ke dalam kriteria tinggi dengan angka rata-rata 95.5%. (3) Rasio Efektivitas PAD sudah masuk ke dalam kriteria sangat efektif.dengan angka rata-rata 121%. (4) Rasio Efisiensi PAD masuk kedalam kriteria tidak efisien dengan angka rata-rata sebesar 205%.

**Kata Kunci: PSAP Nomor 02, Laporan Realisasi Anggaran, Kinerja, Pertumbuhan, Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi**

**ABSTRACT:** The aim of this research is to analyze the implementation of PSAP No.02 concerning LRA and to analyze the performance of income and expenditure seen from (1) PAD Growth Ratio (2) Financial Independence Ratio (3) PAD Effectiveness Ratio (4) PAD Efficiency Ratio at RSJD Dr . Amino Gondohutomo, Central Java Province. This research uses a qualitative descriptive method supported by ratio analysis. The results of this research can be concluded that the LRA presentation is in accordance with Government Accounting Standards No. 2, and the financial performance of RSJD Dr. Amino Gondohutomo Central Java Province in 2022-2023 seen from (1) The growth ratio has not been able to increase its financial growth by an average of 15%. (2) The Independence Ratio has entered the high criteria with an average figure of 95.5%. (3) The PAD Effectiveness Ratio has entered the very effective criteria with an average figure of 121%. (4) The PAD Efficiency Ratio falls into the inefficient criteria with an average figure of 205%.

**Keywords: PSAP No.02, Budget Realization Report, Performance, Growth, Independence, Effectiveness, Efficiency**

## PENDAHULUAN

Penerapan PSAP No.02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dijelaskan dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang telah diubah dengan Permendagri nomor 8 tahun 2009 disebutkan pertanggungjawaban keuangan otonomi daerah dan pemerintah daerah, telah terdapat Sistem Pengendalian Intern (SPI), yang diberi amanat untuk memeriksa apakah laporan keuangan SKPD terutama laporan realisasi anggaran telah disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan secara tepat, meskipun peraturan tersebut telah dibuat, namun pada kenyataannya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih banyak menemukan penyimpangan dalam Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran pendapatan seringkali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin didapat supaya pada saat pelaporan realisasi anggaran, realisasi pendapatan menjadi lebih besar jumlahnya dari anggaran yang telah dibuat. (Badan Pemeriksa Keuangan, 2014, n.d). Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengeluaran Kas dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien dan efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Dalam rangka penerapan

pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan & belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2018: 69). Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efektif dan efisien. Dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, salah satunya dengan melihat kinerja keuangan dalam Laporan Realisasi Anggaran karena Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu belanja modal. LRA juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang diterima dalam mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode berjalan dan periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, merupakan entitas akuntansi yang juga melaksanakan penyusunan laporan keuangan. Sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menduduki prioritas yang paling penting, unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan

melihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah LRA yang disusun oleh RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah telah sesuai penerapannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 (PSAP No.02).
2. Untuk menilai, mengukur dan mengamati tingkat pertumbuhan pendapatan, kemandirian keuangan, efektivitas, dan efisiensi pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, serta merealisasikan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan berdasarkan hasil analisis rasio.

**METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari obyek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan studi pustaka dimana jenis dan sumber data yang digunakan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA) dan Data Rekap

Kriteria penilaian kinerja Kemandirian Keuangan:

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Bantuan\ Pemerintah\ Pusat\ atau\ provinsi+pinjaman} \times 100\%$$

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian</b>
Rendah Sekali	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Sumber: Mahmudi (2019:140)

Realisasi Capaian per-tahun RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah TA 2022-2023.

**Tahapan Analisa**

1. Penelitian dilakukan dengan metode Deskriptif kualitatif, yaitu untuk menguraikan Penerapan PSAP Nomor 02 terhadap Capaian Kinerja RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah TA 2022-2023.
2. Analisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio; Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD dengan menggunakan alat rasio sebagai berikut :

**Rasio Kemandirian Keuangan**

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan Pemerintah provinsi atau daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2019).

**Rasio Efektivitas PAD**

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai sebesar seratus persen.

Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Abdul Halim, 2014).

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria	Ukuran (%)
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90%-100%
Cukup Efektif	80%-90%
Kurang Efektif	60%-80%
Tidak Efektif	0% - 60%

Sumber: Mahmudi (2019:141)

### Rasio Efisiensi

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas saja belum cukup, karena jika hanya dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila

ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien, oleh karena itu perlu dihitung rasio efisiensi PAD nya dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Berikut ini adalah rumus rasio efisiensi menurut Mahmudi (2019):

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Total Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Presentase Kinerja	Ukuran
>40%	Tidak Efisien
30%-40%	Kurang Efisien
20%-30%	Cukup Efisien
10%-20%	Efisien
0%-10%	Sangat Efisien

Sumber: Mahmudi (2019:142)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis antara LRA yang disajikan RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP No.02):

1. Tujuan, ruang lingkup, dan manfaat
2. Struktur-LRA, periode pelaporan, ketepatan waktu
3. Isi-LRA, dan Informasi yang disajikan dalam-LRA
4. Akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi belanja-LRA

5. Akuntansi Surplus atau Defisit-LRA, akuntansi pembiayaan, akuntansi penerimaan pembiayaan
6. Akuntansi pengeluaran pembiayaan, akuntansi pembiayaan neto, akuntansi SiLPA atau SiKPA

### Hasil Analisis Kesesuaian Tujuan, Ruang Lingkup dan Manfaat LRA

Pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dilihat dari penerapan tujuan LRA sebagai sarana untuk memberikan informasi terkait anggaran dan

realisasinya serta ketercapaian target-targetnya telah sesuai dengan PSAP No. 02, dilihat dari Ruang lingkup-LRA menggunakan basis kas dan sebagai entitas pelaporan yang memperoleh anggaran APBD telah sesuai dengan PSAP No.02, dan dari sisi manfaat-LRA pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah sebagai sarana penyediaan informasi tentang sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi beserta realisasinya telah sesuai dengan PSAP No.02.

#### **Analisis Kesesuaian Struktur, Periode Pelaporan, Ketepatan Waktu LRA**

Hasil analisis kesesuaian struktur, periode pelaporan, ketepatan waktu LRA pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah yaitu telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.02.

#### **Hasil Analisis Kesesuaian Isi-LRA dan Informasi yang disajikan dalam-LRA**

Hasil analisis kesesuaian Isi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 yaitu pada prinsipnya LRA yang disusun telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02. Namun catatan yang dapat disampaikan pada penelitian ini yaitu untuk substansi akun-akun pada LRA yaitu pos belanja tak terduga, pos transfer, pos penerimaan pembiayaan, pos pengeluaran pembiayaan, dan pos pembiayaan neto tidak ada dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, karena tidak adanya transaksi tersebut telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.30 tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu jenis pendapatan daerah pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah masuk ke dalam substansi Lain-Lain

PAD yang sah pada pendapatan BLUD sehingga tidak terjadi transaksi transfer dari entitas lain. Pos penerimaan dan pengeluaran pembiayaan juga tidak terjadi pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, karena rumah sakit ini hanya sebagai entitas akuntansi dimana bukan sebagai entitas pelaporan, selanjutnya pada Rumah Sakit ini tidak ada pembiayaan neto karena RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah menggunakan SiLPA untuk operasional tahun berikutnya.

#### **Hasil Analisis Kesesuaian Akuntansi Anggaran, Akuntansi Pendapatan-LRA, dan Akuntansi Belanja yang Disajikan dalam LRA**

Hasil analisis kesesuaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 yaitu pada prinsipnya LRA yang disusun oleh RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02.

#### **Hasil Analisis Kesesuaian Akuntansi Surplus/Defisit-LRA yang Disajikan Dalam LRA**

Hasil analisis kesesuaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 yaitu pada prinsipnya LRA yang disusun oleh RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02. Namun ada catatan yang dapat disampaikan pada penelitian ini yaitu pada substansi akuntansi pembiayaan RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah tidak mengenal Akuntansi Pembiayaan, melainkan hanya mengenal SiLPA untuk menutup defisit, karena RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD). Sedangkan untuk substansi Akuntansi Penerimaan Pembiayaan tidak terjadi di instansi rumah sakit ini karena hanya sebatas entitas akuntansi bukan sebagai entitas pelaporan BLUD.

#### Hasil Analisis Kesesuaian Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan, Pembiayaan Neto, dan SiLPA/SiKPA yang Disajikan Dalam LRA dengan PSAP No. 02

Hasil analisis kesesuaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 yaitu pada prinsipnya LRA yang disusun telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02, namun pada penelitian ini ditemukan perbedaan

antara yang tercantum di PSAP No.02 dengan penerapan-LRA yaitu untuk substansi akuntansi pengeluaran pembiayaan, dan pembiayaan neto tidak terjadi karena rumah sakit ini hanya entitas akuntansi yang mana tidak menjadi entitas pelaporan.

#### Analisis Kinerja Keuangan

Analisis kinerja keuangan yang merupakan pencapaian pelaksanaan kegiatan dari seluruh SKPD termasuk RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah. Terdapat empat (4) rasio yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu rasio pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi keuangan daerah.

**Tabel 1 Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD**

Sumber: Data Sekunder yang diolah, Tahun 2024.

Tahun	PAD Tahun t (Rp)	PAD (t-1) (Rp)	Rasio PAD (Rp)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan
2021	51.102.616.826	-	-	-
2022	74.960.514.784	51.102.616.826	23.857.897.958	47%
2023	50.961.111.377	74.960.514.784	- 23.999.403.407	-32%

#### Hasil Analisis Pertumbuhan PAD

Berdasarkan perhitungan pada tabel 1 dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 sampai tahun 2023 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2022 rasio PAD (selisih antara PAD tahun sekarang dengan PAD tahun sebelumnya) sebesar Rp23.857.897.958, lalu pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu menjadi Rp (23.999.403.407). Tingkat rasio pertumbuhan menunjukkan

penurunan karena pada tahun 2022 rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 47% namun pada tahun 2023 turun menjadi -32%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah negatif, karena kriteria pertumbuhan positif apabila TPD, PAD, dan belanja modal lebih tinggi daripada belanja operasi. Sehingga dapat disimpulkan dari realisasi APBD tahun 2022 ke tahun 2023 belum mampu meningkatkan pertumbuhan PAD secara positif.

**Tabel 2 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Bantuan (Rp)	Tingkat Kemandirian (%)	Keterangan
2022	74.960.514.784	62.304.645.901	120%	Tinggi

2023	50.961.111.377	72.249.817.753	71%	Sedang
------	----------------	----------------	-----	--------

Sumber: Data sekunder yang diolah, Tahun 2024.

**Hasil Analisis Kemandirian Keuangan**

Berdasarkan perhitungan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa data anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan. Tahun 2022 anggaran PAD nya sebesar Rp74.960.514.784, tahun 2023 turun menjadi Rp50.961.111.377. Sedangkan bantuan yang berupa APBD periode 2022 sampai 2023 mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp62.304.645.901, lalu naik di tahun 2023 sebesar Rp72.249.817.753. Dilihat dari tabel tersebut tingkat kemandirian kemampuan keuangan RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan. Tahun 2022 tingkat kemandiriannya adalah tinggi dengan rasio capaian 120%, hal ini berarti

tingkat ketergantungan rumah sakit terhadap sumber dana ekstern atau bantuan pusat/daerah adalah rendah dan rumah sakit mampu andil dalam bagian entitas pelaporan, mampu dalam pencapaian tujuan dan bertanggung jawab, sementara tingkat partisipasi masyarakat pun berada dalam Tingkat yang tinggi juga. Sedangkan pada tahun 2023 tingkat kemandiriannya adalah sedang dengan rasio capaian 71%, hal ini berarti tingkat ketergantungan rumah sakit terhadap sumber dana ekstern atau bantuan pusat/daerah adalah sedang dan rumah sakit mampu andil dalam bagian entitas pelaporan, mampu dalam pencapaian tujuan dan bertanggung jawab, sementara tingkat partisipasi masyarakat pun berada dalam Tingkat yang sedang.

**Tabel 3 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD**

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Tingkat Efektivitas	Keterangan
2022	54.000.000.000	74.960.514.784	139%	Sangat Efektif
2023	49.700.000.000	50.961.111.377	103%	Sangat Efektif

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2024.

**Hasil Analisis Efektivitas PAD:**

Berdasarkan perhitungan tabel tersebut dapat dilihat bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah periode 2022 sampai 2023 mengalami penurunan. Tahun 2022 target PAD nya sebesar Rp54.000.000.000, tahun 2023 target PAD turun menjadi Rp49.700.000.000. Kemudian untuk Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2022 sampai 2023 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2022 realisasi PAD sebesar

Rp74.960.514.784, di tahun 2023 menjadi Rp50.961.111.377. Hal ini menunjukkan tingkat efektivitas anggaran periode 2022 sampai 2023 mengalami penurunan. Tahun 2022 tingkat efektivitas mencapai 139% termasuk kriteria sangat efektif, kemudian tahun 2023 mengalami penurunan Tingkat efektivitasnya yaitu 103% namun masih di nilai sangat efektif. Hal ini berarti kemampuan RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dalam merealisasikan PAD sudah

sangat baik karena telah mampu memenuhi targetnya.

**Tabel 4 Perhitungan Rasio Efisiensi**

Tahun	Pendapatan PAD (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Tingkat Efisiensi	Keterangan
2022	74.960.514.784	117.229.058.098	156%	Tidak Efisien
2023	50.961.111.377	129.508.628.932	254%	Tidak Efisien

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2024.

### Hasil Analisis Efisiensi PAD

Berdasarkan perhitungan tabel 4 dapat dilihat bahwa capaian atau realisasi pendapatan PAD tahun 2022 sebesar Rp74.960.514.784 dan realisasi belanja sebesar Rp117.229.058.098, kemudian pada tahun 2023 capaian pendapatan PAD mengalami penurunan sebesar Rp50.961.111.377 sedangkan realisasi belanjanya mengalami peningkatan sebesar Rp129.508.628.932, sehingga Tingkat rasio efisiensi keuangan di tahun 2022 sampai 2023 mengalami kenaikan. Tahun 2022 tingkat efisiensi mencapai 156%, tahun 2023 mengalami kenaikan tingkat efisiensinya yaitu 254%, hal ini berarti bahwa kinerja keuangan pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah tidak efisien karena kriteria dapat dikatakan efisien dan sangat efisien bila hasil rasio antara 0%-20%.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran yang disusun RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah telah sesuai penerapannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Entitas menerapkan dan melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD), yang memberikan fleksibilitas dan keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat dalam merealisasikan anggarannya.

2. Hasil kinerja keuangan pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari Rasio Pertumbuhan mengalami fluktuatif, yaitu pada tahun 2022 rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 47% namun pada tahun 2023 turun menjadi -32%, sehingga pertumbuhannya adalah negatif. Berdasarkan Rasio Kemandirian keuangan mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2022 tingkat kemandiriannya tinggi dengan rasio capaian 120% dan tahun 2023 turun menjadi 71% hal ini berarti tingkat ketergantungan rumah sakit terhadap sumber dana eksternal (bantuan pusat maupun daerah) adalah sedang. Berdasarkan Rasio Efektivitas PAD dikatakan sangat efektif yaitu tahun 2022 capaian rasio sebesar 139% dan tahun 2023 dengan rasio capaian 103%. Ditinjau berdasarkan Rasio Efisiensi PAD adalah tidak efisien (*inefficient*), tahun 2022 sebesar 156% serta tahun 2023 sebesar 254%.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar Ahmad, F.N. (2014). *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Bogor: In Media.

- Bungin, B. (2013). *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media group.
- Fahmi, I. (2017). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN*. Bandung: ALFABETA. Graha Ilmu, 2010.
- Gurhanawan. (2022). Analisis laporan realisasi anggaran sebagai penilaian terhadap kinerja keuangan pada kantor inspektorat pembantu wilayah kerja Jakarta Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis, Vol 1 No 3*, Halaman 1 s.d 7.
- Halim, A. dan Kusufi, M. S. (2014). “*Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*”. Jakarta: Salemba.
- Hardani Ahyar, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Kiky Muryanti.2017. *Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015*. Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan DAERAH KOTA MATARAM*. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, Vol. 7, No. 1, Halaman 81 s.d 92.
- Tyas Nurulafifah. (2012). “*Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*”. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang *Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah TA 2023*.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2023 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Kelas A*.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, cv.
- Susanto, H. (2019). ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH *Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta

Undang - Undang Nomor 17 Tahun  
2003 Tentang *Keuangan  
Negara. Undang - Undang  
Nomor 23 Tahun 2014  
Tentang Pemerintahan  
Daerah.*

Undang - Undang Nomor 17 Tahun  
2003 Tentang *Keuangan  
Negara. Undang - Undang  
Nomor 23 Tahun 2014  
Tentang Pemerintahan  
Daerah.*